

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan disusun sebagai acuan dalam pelaksanaan penyusunan program dan kegiatan pada tahun berkenaan, Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Penyusunan RKPD merupakan pelaksanaan dari Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan pemerintah Daerah.

RENJA mempunyai fungsi penting dalam sistem perencanaan daerah, karena RENJA menerjemahkan perencanaan strategis jangka menengah (RPJMD dan Renstra SKPD) ke dalam rencana, program, dan penganggaran tahunan, RENJA menjembatani sinkronisasi, harmonisasi Rencana Strategis ke dalam langkah langkah tahunan yang lebih konkrit dan terukur. Dengan demikian RENJA merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD), Dimana kebijakan umum APBD ditetapkan secara bersama-sama antara Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan Pemerintah. Dengan cakupan dan cara penetapan tersebut, RENJA mempunyai fungsi pokok dan menjadi acuan bagi seluruh pelaku pembangunan karena memuat seluruh kebijakan publik sebagai berikut :

1. Menjadi pedoman dalam penyusunan APBD karena memuat arah kebijakan pembangunan Daerah satu tahun;
2. Menciptakan kepastian kebijakan, karena merupakan komitmen Pemerintah.

Proses penyusunan RENJA didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan Daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut penyusunan Dokumen RKPD dan RENJA SKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan

bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, Pelayanan umum, pemanfaatan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya lainnya. Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang rancangan RKPD dan RENJA SKPD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan SKPD serta masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Rencana Kerja SKPD yang dilanjutkan dengan RENJA SKPD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan RENJA SKPD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, Prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

Dalam perencanaan pembangunan di bidang Perikanan tujuan yang ingin dicapai harus benar-benar di rencanakan dengan matang, pengkajian yang akurat dan tolok ukur indikator kinerja yang tepat sehingga menghasilkan output program dan kegiatan yang terukur dan berkualitas.

Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu sebagai Dinas Daerah yang menangani urusan pilihan Perikanan dengan mengacu pada Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 tahun 2017 dan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD adalah sebagai dasar Dinas Perikanan dalam Menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Renja SKPD dimaksudkan untuk menyediakan dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Program dan Kegiatan tahun anggaran 2019.

Rencana Kerja di bidang Perikanan adalah penjabaran Operasional Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tanah Bumbu merupakan sebuah dokumen perencanaan sektoral berskala daerah yang disusun secara sistematis dalam rangka menata perbaikan, pembaharuan dan peningkatan dalam bidang Perikanan dengan berpedoman pada arah kebijakan yang tertuang dalam peraturan daerah Tanah Bumbu

1.2. Landasan Hukum

Dalam penyusunan RENJA Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu mengacu dan berpedoman pada sejumlah peraturan yang digunakan sebagai dasar, yaitu :

1. Undang-Undang Nomor: 02 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu.
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor:25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
4. Undang-Undang No 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009
5. Undang- Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Undang Undang No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Undang-Undang 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
8. Peraturan Pemerintah No. 02 Tahun 2018 Tentang Standar Pelayanan Minimal.
9. Peraturan Pemerintah No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten /Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 No 82, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4737);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Dalam Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Presiden RI No. 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.

14. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor.13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah Sebagaimana telah dirubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri No. 59 Tahun 2007 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri No. no. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah.
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD
18. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No. 45/PERMEN-KP/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan RI Nomor 25/PERMEN-KP/2015 Tentang Rencana Strategis KKP Tahun 2015-2019.
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor. 17 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025.
20. Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.31 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud dari Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu ini adalah untuk mengetahui dan mendokumentasikan perencanaan dalam kurun waktu satu tahun yang berisi program-program prioritas yang dilaksanakan langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu dengan dukungan pembiayaan dari Pemerintah Pusat, Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dengan harapan dapat mendorong partisipasi masyarakat.

Sedangkan Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah :

1. Mendiskripsikan tentang program-program prioritas yang akan dilaksanakan langsung oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu;
2. Program-program tersebut dapat terlaksana sesuai yang diharapkan dengan menitikberatkan pada program - program prioritas

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Perikanan yaitu sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN, Berisi tentang Latar Belakang, Landasan Hukum, maksud dan tujuan serta Sistematika Penyusunan

BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU, Berisi tentang Evaluasi Pelaksanaan Renja dan Renstra Tahun lalu, Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan indicator kinerja yang sudah ditentukan, permasalahan dan hambatan tantangan maupun peluang dalam meningkatkan pelayanan SKPD, perbandingan antara rancangan awal RKPD terhadap analisis hasil kebutuhan, kajian terhadap usulan program/kegiatan dari usulan pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat , LSM, Asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari hasil Musrenbang.

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH, menggambarkan tentang Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD, Perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra SKPD, Uraian garis besar mengenai rekapitulasi jumlah program dan jumlah kegiatan.

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH, Berisi tentang strategi Kebijakan dan Rencana kerja serta pendanaan indikatif

BAB V. PENUTUP, Berisi tentang Kesimpulan.

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LAU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Sebagaimana amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 juga harus dilakukan evaluasi. Evaluasi terhadap Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 meliputi 3 (tiga) hal, yaitu kebijakan perencanaan program & kegiatan, pelaksanaan rencana program & kegiatan, dan hasil rencana program & kegiatan.

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019, memperhatikan beberapa unsur pokok sebagai mana berikut :

1. Masalah-masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
2. Tujuan yang dikehendaki;
3. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya;
4. Kebijakan- kebijakan dalam pelaksanaannya serta organisasi pelaksanaannya

Penyusunan Renja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2019 juga memperhatikan hal hal sebagai berikut:

1. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2018 sebagai entry point dalam penyusunan perencanaan tahun 2019;
2. Memperhatikan keberlanjutan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan. Masalah -masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;

Rekapitulasi Evaluasi hasil pelaksanaan Renja dan pencapaian renstra Dinas Perikanan sampai dengan tahun 2018 dapat di uraikan pada Tabel Berikut :

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD
dan Pencapaian Renstra SKPD s.d Tahun 2018
Kabupaten Tanah Bumbu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra SKPD) Tahun 2020	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s.d tahun 2016	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2017			Target Program dan Kegiatan (Renja SKPD tahun 2018)	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD s.d 2018	
					Target Renja SKPD tahun 2017	Realisasi Renja SKPD tahun 2017	Ringkasan Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s.d 2018	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	52.607,6 Ton	42.532,6 Ton	48.143,41 Ton	42.537,75	88%	49.587,71 Ton	49.587,71 Ton	100%
		Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan	246 Kelompok	51 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok	100%	49 Kelompok	49 Kelompok	100%
	Kegiatan Pemeliharaan Rutin/berkala Tempat Pelelangan Ikan	<i>Jumlah PPI Yang terpelihara</i>	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%			
	Kegiatan Pengembangan sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap</i>	39 jenis	4 Jenis	7 jenis	4 Jenis	57%	10 jenis	10 jenis	100%
		<i>Jumlah Kelompok Nelayan yang Mendapat Bantuan</i>	46 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	10 Kelompok	100%	9 Kelompok	9 Kelompok	100%
	Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	<i>Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan</i>	200 Kelompok	46 Kelomok	40 Kelomok	40 Kelompok	100%	40 Kelomok	40 Kelomok	100%
	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikan Budidaya	13.101 Ton	3.757 Ton	5.482 Ton	4.207,85	77%	7.329 Ton	7.329 Ton	100%
		Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan	366 Kelompok	87 Kelompok	75 Kelompok	75 Kelompok	100%	75 Kelompok	75 Kelompok	100%
	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya</i>	27 jenis	5 jenis	7 jenis		0%	6 jenis	6 jenis	100%
		<i>Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat Bantuan</i>	176 Kelompok	0	40 Kelompok		0%	35 Kelompok	35 Kelompok	100%
	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	<i>Jumlah Pokdakan Yang Dibina</i>	190 Kelompok	75 Kelompok	35 Kelompok	35 Kelompok	100%	40 Kelompok	40 Kelompok	100%
	Program	Rekomendasi Hasil	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			

			Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar								
			Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,	<i>Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar</i>	3 Dokumen		1 Dokumen	1 Dokumen	100%			
			Program Pengembangan Budidaya Perikanan			63.240 Ekor		-	0%			
			Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	<i>Jumlah Benih Udang Galah</i>	355,000 Ekor	63.240 Ekor		-	0%	335,000 Ekor	335,000 Ekor	100%
			Program Optimalisasi Pengelolaan dan Pemasaran Produksi Perikanan	Konsumsi Ikan	47.6 kg/perkapita	47.6 kg/perkapita		-	0%			
				Jumlah Produksi Hasil Olahan	1.455,75 Ton	1.455,75 Ton			0%			
			Kegiatan Pembinaan, Pengembangan Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Serta Peningkatan Mutu Hasil Perikanan	<i>Jumlah Upi dan Pemasar Yang Mendapat Pembinaan dan Pendampingan</i>	75 UPI	75 UPI		-	0%			
				<i>Jumlah UPI Yang Memenuhi Standar Mutu Pangan</i>	3 UPI	3 UPI			0%			
			Kegiatan Peningkatan Promosi Dan Pemasaran Hasil Kelautan Dan Perikanan	<i>Jumlah Produksi dan Hasil olahan Perikanan yang di promosikan</i>	6 jenis	6 jenis		-	0%			
			Kegiatan Pemeliharaan, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan yang terpelihara</i>	2 Unit/ Tahun	2 Unit/ Tahun		-	0%			
				<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Kelautan dan Perikanan</i>	1 Unit	1 Unit			0%			
			Program Perberdayaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	Jumlah Kelompok Ekonomi Masyarakat Pesisir yang mendapat akses permodalan	2 Kelompok	2 Kelompok		-	0%			
			Kegiatan Pembinaan Ekonomi Masyarakat Pesisir	<i>Jumlah Kelompok yang dibina</i>	4 Kelompok	4 Kelompok		-	0%			
			Program Pemberdayaan	Kawasan ekosistem Pesisir dan Perairan	3 Kawasan	3 Kawasan		-	0%			

			Masyarakat dalam Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan	Umum yang Terahabilitasi									
			Kegiatan Pengembangan, Pengelolaan dan Rehabilitasi Ekosistem Pesisir dan Perairan Umum	<i>Luas Rehabilitasi Mangrove</i>	20.000 M2	20.000 M2		-	0%				
				<i>Luas Rehabilitasi Terumbu Karang</i>	100 M2	100 M2			0%				
			Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pengawasan Perlindungan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan	<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengawasan dan Perlindungan</i>					0%				
			Program Peningkatan Kesadaran dan Penegakan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	<i>Meningkatnya Kesadaran Hukum Dalam Pendaya Gunaan Sumberdaya Laut</i>	25 Kelompok	25 Kelompok		-	0%				
				<i>Jumlah Kasus Ilegal Fishing</i>	8	8			0%				
			Kegiatan Penyuluhan Hukum dalam Pendayagunaan Sumberdaya Laut	<i>Jumlah Pembinaan Pokmaswas</i>	7 Kali	7 Kali		-	0%				
				<i>Jumlah Sosialisasi Undang-undang</i>	4 Kali	4 Kali			0%				
				<i>Jumlah Patroli</i>	8 Kali	8 Kali			0%				
			Program Administrasi Perkantoran	<i>Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran</i>	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
			Kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	<i>Terbayarnya rekening kantor</i>	12 Bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
			Kegiatan Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	<i>Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara</i>	44 Unit	32 Unit	34 Unit	36 Unit	106%	40 Unit	40 Unit	100%	
			Kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan	<i>Tersedianya jasa administrasi Keuangan</i>	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%	
			Kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor	<i>Tersedianya alat dan bahan kebersihan kantor</i>	12 bulan	12 Bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	
			Kegiatan Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	<i>Terpeliharanya peralatan kerja</i>	50 unit	31 unit	50 unit	29 Unit	58%	50 unit	50 unit	100%	
			Kegiatan Penyediaan	<i>Tersedianya Alat Tulis</i>	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%	

			alat tulis kantor	<i>Kantor</i>								
			Kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	<i>Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan</i>	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
			Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	<i>Tersedianya alat listrik kantor</i>	12 bulan	12 bulan	12 bulan	12 Bulan	100%	12 bulan	12 bulan	100%
			Kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	<i>Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor</i>	101 Unit	31 Unit	30 unit	15 Unit	50%	9 Unit	9 Unit	100%
			Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum	<i>Tersedianya makan dan Minum untuk rapat koordinasi</i>	1500 ok	750 ok	1500 ok	594 OK	40%	1500 ok	1500 ok	100%
			Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang undangan	<i>Tersedianya Bahan Bacaan</i>	12 Bulan		12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
			Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	<i>Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke Luar daerah</i>	140 ok	57 ok	140 ok	16 Ok	11%	140 ok	140 ok	100%
			Kegiatan Penyedia jasa tenaga non PNS	<i>Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS</i>	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	100%
			Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	<i>Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	435 ok	251 ok	300 ok	263 Ok	88%	435 ok	435 ok	100%
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor	<i>Tersedianya Bahan Logistik Kantor</i>	12 Bulan					12 Bulan	12 Bulan	100%
			Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	<i>Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur</i>	100%		100%		0%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	<i>Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional</i>	8 Unit		2 Unit		0%			100%
			Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	<i>Terpelihara Bangunan Gedung Kantor</i>	15 unit		3 unit		0%	4 unit	4 unit	100%
			Program peningkatan disiplin aparatur	<i>Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam Kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai</i>	100%	100%	100%		0%	100%	100%	100%
			Kegiatan Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	<i>Jumlah Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu</i>	445 Stell	85 stell	90 Stell		0%	90 Stell	90 Stell	100%

Dari Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s.d. Tahun 2018 di atas dapat kita lihat bahwa hampir semua program yang telah direncanakan dalam renstra terealisasi. Namun ada beberapa program tidak dapat secara maksimal terealisasi, Keterbatasan dan kendala teknis mengakibatkan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu tidak dapat secara maksimal melaksanakan semua program kerja yang telah direncanakan.

Walaupun tingkat pencapaian Target kinerja tersebut termasuk masuk kategori *Sangat Baik / Sangat Berhasil*, namun perlu ditingkatkan karena belum sesuai dengan yang diharapkan dan direncanakan. Banyak faktor yang mempengaruhi/menghambat pencapaian sasaran tersebut, antara lain :

Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap belum optimal disebabkan beberapa factor antara lain:

1. Penggunaan alat tangkap lampara dasar yang telah dilarang penggunaannya sesuai dengan Permen KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016;
2. Perubahan dari siklus hidup ikan yang sudah mulai mengalami penurunan dari tahun ke tahun;
3. Musim yang tidak menentu atau perubahan cuaca yang tidak merata, sehingga kebanyakan nelayan dengan armada kecil tidak melaut;
4. Alat tangkap maupun kapal yang kecil (rata-rata <10 GT), sehingga menyebabkan nelayan tidak mampu beroperasi di wilayah penangkapan yang jauh dari pantai, meskipun secara potensi masih cukup besar area penangkapan ikan;
5. Peningkatan produksi perikanan budidaya belum optimal disebabkan beberapa faktor:
 - Sarana dan prasarana perikanan budidaya belum memadai
 - Terbatasnya sarana produksi pembudidaya
 - Penerapan teknologi tepat guna masih didominasi pola tradisional

Berbagai permasalahan atau kendala di atas diusahakan untuk diatasi atau paling tidak dikurangi tingkat pengaruhnya agar tidak menghambat pencapaian sasaran dan tindak lanjut upaya yang akan dilakukan antara lain :

1. Pemerintah masih mengkaji ulang terhadap PERMEN KP NOMOR 71/PERMEN-KP/2016 yang diharapkan ada solusi jenis alat tangkap pengganti yang lebih ramah lingkungan;
2. Memberikan bantuan kapal 5 GT keatas kepada kelompok masyarakat nelayan (KUB);
3. Zona tangkapan ikan yang sangat terbatas terkait UU No. 23 Tahun 2014;
4. Pembinaan terhadap masyarakat penangkap ikan dengan alat tangkap yang ramah lingkungan, sehingga tidak merusak terhadap biota-biota yang ada di laut dan sungai
5. Meningkatkan kegiatan kelompok masyarakat pengawas (POKMASWAS) yang lebih efektif, efisien dan tepat sasaran;
6. Optimalisasi kegiatan pembinaan-pembinaan melalui petugas teknis dan penyuluhan-penyuluhan yang dilakukan oleh PPL perikanan terhadap kegiatan perikanan laut dan juga budidaya perikanan darat atau tawar.
7. Penerapan teknologi tepat guna budidaya air payau dan air tawar;
8. Normalisasi saluran tambak dan kolam air tawar;
9. Bantuan bibit ikan air tawar dan bibit ikan air payau;
10. Bantuan sarana dan prasarana terhadap pembudidaya ikan;
11. Peningkatan kapasitas pembudidaya;
12. Peningkatan kapasitas aparatur (SDM);

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan Tanah Bumbu secara umum telah dituangkan dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 31 tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Unsur-Unsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, yang meliputi :

Tugas Pokok:

Melaksanakan urusan Pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Perikanan.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan penyelenggaraan serta pengevaluasian urusan pemerintahan di bidang perikanan tangkap;
2. Perumusan dan penetapan kebijakan teknis pembinaan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang perikanan budidaya;

3. Melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam perumusan dan penetapan kebijakan dibidang Perikanan;
4. Melakukan pembinaan dan pengendalian unit pelaksana Teknis Dinas; dan
5. Perumusan dan pengawasan dan pengelolaan kegiatan kesekretariatan;
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Unsur-Unsur Organisasi yang ada pada Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yaitu:

1. Sekretariat

Tugas

Mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi

Uraian Tugas dimaksud :

- a. Melaksanakan koordinasi kegiatan dengan unit kerja dilingkungan Dinas;
- b. Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja dan anggaran Dinas;
- c. Menyelenggarakan pelaksanaan urusan tata laksana keuangan;
- d. Melaksanakan urusan perbendaharaan dan gaji;
- e. Melaksanakan urusan verifikasi dan akuntansi keuangan;
- f. Melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kepegawaian;
- h. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai;
- i. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kearsipan;
- j. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan rumahtangga dan perlengkapan;
- k. Menyiapkan bahan dan pelaksanaan urusan kerja sama dan kehumasan;
- l. Melaksanakan pengelolaan dan inventarisasi barang milik negara;
- m. Melaksanakan layanan pengadaan Dinas;
- n. Melaksanakan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;

- o. Melaksanakan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- p. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan;
- q. Menyelenggarakan pengelolaan kegiatan dokumentasi dan informasi;
- r. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan data dan penyelenggaraan urusan teknologi informasi;
- s. Menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait;
- t. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas;
- u. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas

Bagian Sekretariat terdiri dari :

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Tugas

Mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengelolaan urusan ketatausahaan, persuratan, kearsipan, rumahtangga, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, penyusunan peraturan perundang-undangan, kehumasan dan pengelolaan barang milik negara.

Uraian Tugas dimaksud :

- a. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata usaha;
- b. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan rumah tangga;
- c. Melaksanakan layanan pengadaan dinas;
- d. Melaksanakan penataan administrasi pendistribusian sarana alat kantor dan keperluan alat kantor terhadap unsur-unsur unit organisasi;
- e. Menyiapkan bahan dan melaksanakan pengelolaan, inventarisasi, pemeliharaan, penghapusan serta penyusunan laporan barang milik negara;
- f. Menyiapkan bahan dan melaksanakan urusan tata persuratan dan kearsipan;
- g. Melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadualan retensi serta pemusnahan arsip;
- h. Melaksanakan pelayanan administrasi perjalanan dinas, akomodasi tamu, kehumasan dan keprotokolan serta kerjasama;

- i. Menyiapkan bahan pembinaan pegawai, meliputi pembinaan disiplin, pengawasan melekat, kesejahteraan, pemberian tanda jasa/ penghargaan dan kedudukan hukum pegawai;
- j. Melaksanakan penataan administrasi kepegawaian yang meliputi bazzeting, formasi, DUK, data pegawai, pengarsipan berkas pegawai dan rekapitulasi absensi pegawai;
- k. Menghimpun bahan usulan mutasi kepegawaian, meliputi pengusulan, kepangkatan dalam jabatan, kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala, pemindahan, pemberhentian dan pensiun;
- l. Menyiapkan bahan pembinaan organisasi dan tata laksana Dinas;
- m. Menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- n. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan

Tugas

Melaksanakan penyusunan rencana, program kerja, anggaran, keuangan, pengelolaan data dan informasi publik, pendokumentasian serta pelaporan dinas

Uraian Tugas dimaksud :

- a. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun program dan rencana kerja dinas;
- b. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana strategis;
- c. Menyusun rencana anggaran bulanan/triwulan dinas;
- d. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana kegiatan dan anggaran (RKA) dan penyusunan anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) dan anggaran belanja negara;
- e. Menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun rencana anggaran tidak langsung dinas;
- f. Menyiapkan bahan dan mengelola administrasi pembayaran belanja dinas;
- g. Melakukan pengelolaan pembayaran gaji pegawai dan keperluan/kebutuhan kantor;

- h. Menyiapkan bahan dan membuat pertanggung-jawaban pelaksanaan anggaran;
- i. Melaksanakan pengumpulan dan pengelolaan data keuangan;
- j. Menyiapkan dan menyusun laporan keuangan dan memelihara pengarsipan administrasi keuangan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data keuangan;
- l. Melaksanakan penatausahaan penetapan pejabat perbendaharaan;
- m. Menyusun rencana dan melaksanakan kegiatan pengumpulan, pengelolaan, analisa dan penyajian data;
- n. Menyelenggarakan pemanfaatan teknologi informasi;
- o. Menyelenggarakan dan mengelola pengamanan data dan informasi;
- p. Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;
- q. Melaksanakan penyelenggaraan publikasi;
- r. Melaksanakan pengelolaan dan penyebarluasan informasi;
- s. Menghimpun dan menyiapkan bahan penyusunan laporan akuntabilitas dinas, laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah dan laporan-laporan kedinasan lainnya;
- t. Menyiapkan bahan penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKSN);
- u. Menyiapkan bahan dalam rangka pemantauan pelaksanaan tata naskah dan tata kearsipan agar diperoleh surat menyurat dan kearsipan/dokumentasi yang benar, tertib dan rapi sesuai dengan petunjuk dan ketentuan yang berlaku;
- v. Menghimpun dan menyiapkan bahan untuk mendokumentasikan hasil kegiatan administrasi keuangan, kepegawaian maupun kegiatan masing-masing bidang;
- w. Menyiapkan bahan dalam rangka penyusunan laporan untuk disampaikan kepada satuan kerja yang membutuhkan laporan pengembangan kinerja Dinas;
- x. Menyiapkan bahan koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
- y. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- z. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Bidang Perikanan Tangkap

Tugas

Melakukan penyiapan koordinasi fasilitasi perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan program kegiatan, evaluasi serta pelaporan di bidang Perikanan Tangkap.

Uraian Tugas dimaksud :

- a. Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Memfasilitasi dan mendukung atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil, Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Merumuskan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Nelayan Kecil, Perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- d. Koordinator dalam melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data di bidang Pemberdayaan Nelayan Kecil Perizinan dan Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- e. Merumuskan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan pengadaan sarana dan prasarana nelayan kecil, perizinan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- f. Merumuskan kebijakan pelayanan penerbitan SIUP di bidang pembudidayaan ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUPI) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKHPIH);
- g. Mengelola dan memanfaatkan sumber daya ikan;
- h. Melaksanakan dan mengkoordinasikan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan nelayan kecil, perizinan dan pengelolaan TPI;
- i. Melaksanakan identifikasi, inventarisasi analisa kebutuhan serta produksi pengembangan teknologi hasil penangkapan;
- j. Melaksanakan pengelolaan, riset, pemetaan dan koordinasi tata ruang wilayah perikanan;
- k. Merencanakan penetapan sasaran areal, target dan realisasi produksi perikanan;

- l. Melaksanakan koordinasi mengkomodir dan memfasilitasi masalah pesisir kabupaten dengan instansi terkait;
- m. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan;
- n. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

Bidang Perikanan Tangkap terdiri dari :

1. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil

Tugas

Menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian di bidang pemberdayaan nelayan kecil di wilayah pesisir kabupaten.

Uraian Tugasdimaksud :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data-data nelayan kecil, data sumberdaya ikan dan data produksi penangkapan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis dibidang pemberdayaan nelayan kecil dan sumber daya ikan di wilayah pesisir kabupaten.
- c. Melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan pengendalian terhadap nelayan di wilayah pesisir kabupaten;
- d. Menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan serta pendampingan dalam rangka pemberdayaan nelayan;
- e. Melaksanakan fasilitasi kemitraan usaha dan kemudahan akses terhadap ilmu pengetahuan, teknologi dan informasi serta pembinaan kelembagaan nelayan kecil;
- f. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan estimasi stok ikan;
- g. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan nelayan kecil dan penangkapan lainnya;
- h. Melaksanakan kegiatan dan koordinasi perlindungan, pelestarian dan pemanfaatan plasma nutfah sumber daya ikan;
- i. Melaksanakan bimbingan teknis, pemantauan, evaluasi pelaksanaan program pembinaan tenaga penyuluh dan nelayan;
- j. Melaksanakan koordinasi pembuatan dan penyebarluasan peta pola migrasi dan penyebaran ikan;

- k. Melaksanakan kegiatan identifikasi, inventarisasi analisa kebutuhan sarana produksi perikanan;
- l. Merencanakan penetapan sasaran areal, target dan realisasi produksi perikanan;
- m. Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- n. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasannya sesuai bidang tugas.

2. Seksi Perizinan dan Pengelolaan TPI

Tugas

Menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan pengkoordinasian penyelenggaraan kegiatan di bidang penerbitan perizinan perikanan, TPUP, TPKPIH, dan pengelolaan TPI.

Uraian Tugas dimaksud :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penerbitan SIUP pembudidayaan ikan, Tanda Pencatatan Usaha Pembudidayaan Ikan (TPUP) dan Tanda Pencatatan Kapal Pengangkut Ikan Hidup (TPKPIH) di wilayah kabupaten;
- b. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyelenggaraan dan pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan;
- c. Menyiapkan bahan penyusunan program, mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan teknis penerbitan izin SIUP pembudidayaan ikan, TPUP dan TPKPIH lingkup kabupaten dan Penyelenggaraan serta Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan ;
- d. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi rekomendasi perizinan;
- e. Merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan pemeriksaan fisik kapal perikanan berukuran sampai dengan 5 GT;
- f. Merumuskan bahan dan memfasilitasi rekomendasi dan perizinan penggunaan sarana-prasarana penangkapan dan pembudidayaan ikan sesuai dengan kewenangannya;
- g. Merencanakan, mengatur dan mengkoordinasikan kegiatan standarisasi kelaikan kapal perikanan dan penggunaan alat tangkap ikan dan pembudidayaan ikan;
- h. Melakukan pembinaan rutin atas penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;

- i. Melaksanakan pengadaan sarana dan prasarana penunjang kegiatan penerbitan izin perikanan dan Tempat Pelelangan Ikan;
- j. Melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan penerbitan izin perikanan dan pengelolaan serta penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan;
- k. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas/kegiatan; dan
- l. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang tugas.

3. Bidang Perikanan Budidaya

Tugas

Melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan kegiatan di bidang Perikanan Budidaya.

Uraian Tugas dimaksud :

1. Merumuskan kebijakan teknis Bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan Pembudidayaan Ikan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Bupati berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Melaksanakan fasilitasi dan dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perikanan budidaya khususnya pada bidang Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan kawasan budidaya perikanan dan pengelolaan Pembudidayaan Ikan;
3. Merumuskan kebijakan operasional dan pelaksanaan kegiatan dan fasilitasi di bidang sarana prasarana perikanan budidaya dan pemberdayaan usaha kecil dan pengelolaan pembudidayaan ikan;
4. Merumuskan kebijakan operasional, pembinaan dan pelaksanaan kegiatan di bidang sumber daya ikan dan pengembangan teknologi pembudidayaan;
5. Melakukan koordinasi penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pengembangan teknologi dan pembudidayaan dan Pemberdayaan Usaha Kecil dan Pengelolaan kawasan dan Pembudidayaan Ikan;
6. Penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi kegiatan di bidang sarana prasarana budidaya dan kesehatan ikan; dan

7. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data bidang perikanan budidaya;
8. Melaksanakan kegiatan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
9. Melaksanakan kegiatan dibidang produk pembenihan dan mutu benih/induk ikan;
10. Melaksanakan pembangunan dan pengelolaan balai benih ikan dan pelaksanaan kebijakan keramba jaring apung;
11. Melaksanakanevaluasidanlaporanpelaksanaantugas;dan
12. Melaksanakantugas lain yang diberikanolehatasansesuaidenganbidangtugas

Bidang Perikanan Budidaya terdiri dari :

1. Seksi Pembinaan Usaha Kecil dan Pembudidayaan Ikan

Tugas

Menyiapkan bahan penyusunan program, petunjuk teknis dan Pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pembinaan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan.

Uraian Tugasdimaksud :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data rencana program kegiatan pembinaan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- b. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan operasional pemberdayaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- c. Melaksanakan kegiatan pengumpulan data penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- d. Menginventarisir, mengidentifikasi, menyiapkan peserta pelatihan dan pendidikan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- e. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- f. Melaksanakan evaluasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- g. Melaksanakan pelaporan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan kelembagaan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;

- h. Melaksanakan pendampingan, fasilitasi dan mempermudah akses terhadap ilmu pengetahuan dan teknologi untuk pengembangan usaha kecil dan pembudidayaan ikan;
- i. Melaksanakan kegiatan produk pembenihan perikanan di air tawar, air payau dan laut;
- j. Melaksanakan kegiatan peningkatan mutu benih/induk ikan;
- k. Melaksanakan kegiatan pengadaan, penggunaan dan peredaran serta pengawasan obat ikan, bahan kimia, bahan biologis dan pakan ikan;
- l. Melaksanakan kegiatan akreditasi lembaga sertifikasi perbenihan ikan;
- m. Melaksanakan kegiatan pemberian rekomendasi ekspor, impor, induk dan benih ikan;
- n. Melaksanakan kegiatan teknis pelepasan dan penarikan varietas induk/benih ikan;
- o. Melaksanakan kegiatan teknis perbanyak dan pengelolaan induk penjenis, induk dasar dan benih alam;
- p. Memfasilitasi kegiatan perijinan dan penerbitan IUP di bidang pembudidayaan ikan yang tidak menggunakan tenaga kerja asing;
- q. Melaksanakan kegiatan pemasukan, pengeluaran, pengadaan, pengedaran dan/atau pemeliharaan ikan;
- r. Melaksanakan pembudidayaan ikan dan perlindungannya;
- s. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- t. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

2. Seksi Pengelolaan Kawasan dan Penyelenggaraan Perikanan Budidaya

Tugas

Melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW dan penyelenggaraan perikanan budidaya, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan serta mutu pakan dan obat ikan.

Uraian Tugas dimaksud :

- a. Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data penyusunan rencana Pengelolaan Kawasan dan Penyelenggaraan Perikanan Budidaya pembudidayaan ikan berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

- b. Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan operasional Pengelolaan Kawasan dan Penyelenggaraan Perikanan Budidaya ;
- c. Melaksanakan kegiatan Pengelolaan Kawasan dan Penyelenggaraan Perikanan Budidaya ;
- d. Melaksanakan pengelolaan kawasan budidaya perikanan berdasarkan RTRW, penyediaan data dan informasi pengelolaan penyelenggaraan, pengelolaan air dan lahan untuk pembudidayaan ikan, pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan, pembinaan mutu ikan dan mutu obat ikan untuk pembudidayaan ikan ;
- e. Melaksanakan penyusunan peta potensi lahan perikanan budidaya kabupaten
- f. Melaksanakan pembinaan cara pembenihan dan pembesaran ikan yang baik ;
- g. Melaksanakan pembinaan pengelolaan balai benih ikan air tawar, air payau dan laut ;
- h. Melaksanakan penyediaan benih ikan, calon induk dan indukan yang bermutu;
- i. Melaksanakan pembinaan mutu pakan dan obat ikan yang digunakan pembudidayaan ikan ;
- j. Melaksanakan pelestarian calon induk, induk dan atau benih ikan ;
- k. Membina dan melaksanakan kegiatan tata pemanfaatan air dan tata lahan pembudidayaan ikan;
- l. Mengelola penggunaan sarana prasarana pembudidayaan ikan;
- m. Melaksanakan pengawasan alat pengangkut, unit penyimpanan hasil produksi budidaya ikan dan unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya;
- n. Melaksanakan koordinasi masalah wabah dan wilayah wabah penyakit;
- o. Melaksanakan kebijakan keramba jaring apung;
- p. Melaksanakan penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan kawasan dan sarana prasarana perikanan budidaya ;
- q. Melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- r. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugas.

4. Balai Benih Ikan (Unit Pelaksana Teknis Dinas)

Balai Benih Ikan (BBI) mempunyai tugas melaksanakan pembenihan udang, perekayasa dan kajian ilmiah teknologi pembibitan dan pembenihan udang dan pengelolaan sarana dan prasarana di kawasan BBI

Uraian Tugasdimaksud :

- 1) Melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data pembenihan dan perekayasa benih;
- 2) Menyiapkan bahan penyusunan program kegiatan operasional pembenihan dan perekayasa benih/bibit udang.
- 3) Melaksanakan kegiatan pengembangan teknologi dan pembudidayaan benih/bibit udang;
- 4) Melaksanakan penyelenggaraan dan pengelolaan balai benih udang;
- 5) Melaksanakan penyediaan sarana prasarana serta pendukung kegiatan BBI;
- 6) Mengelola sarana prasarana BBI;
- 7) Melaksanakan tugas lain yang diperintah atasan;
- 8) Kepala BBI dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang kasub Tata Usaha yang tugasnya sesuai dengan tugas kesekretariatan atau kegiatan ketatausahaan lainnya

berdasarkan tugas dan fungsi yang telah diuraian diatas dapat dijelaskan bahwa kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan sebagaimana yang dibebankan daerah dalam Indikator Kinerja Utama pada Rencana Jangka Menengah Daerah (RPJMD)yaitu seperti tergambar pada Tabel berikut :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD Dinas Perikanan
Kabupaten Tanah Bumbu

No	Indikator	SPM /Standar Nasional	IKK	Target Renstra SKPD					Realisasi Capaian		Proyeksi	Catatan Analisis
				Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2016	Tahun 2017	Tahun 2018	
				(Thn n-5)	(Thn n-4)	(Thn n-3)	(Thn n-2)	(Thn n-1)	(Thn n-5)	(Thn n-4)	(Thn n-3)	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Produksi Perikanan (Ton)			50,841.17	53,625.41	56,916.71	60,874.34	65,708.60	46,289.6	53,625.41	56,916.71	
	- Produksi Perikanan Tangkap (Ton)			46,741.17	48,143.41	49,587.71	51,075.34	52,607.60	42,532.6	48,143.41	49,587.71	
	- Produksi Perikanan Budidaya (Ton)			4,100.00	5,482.00	7,329.00	9,799.00	13,101.00	3,757.0	5,482.00	7,329.00	
2	Angka Konsumsi Ikan			47,3	48,5	49,8	51,1	51,5	47.6		49,8	
3	Cakupan Bina Kelompok Nelayan (%)			8.26	10.99	13.16	14.93	16.39	5.68	7.14	13.16	
4	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan (%)			26.25	25.89	25.61	25.38	25.19	14.1	17.96	25.61	
7	Nilai Tukar Nelayan											
8	Retribusi Penjualan Benur			23,625,000	-	25,125,000	25,875,000	26,625,000	4,743,000		25,125,000	
9	Jumlah Produksi Bakso Ikan (Fokus Sentra)			40,57	42,59	44,72	46,95	49,29	58,57			
10	Terbentuknya Kerjasama Unit Kemitraan Pemasaran			12	18	24	36	54				
11	Luas Kawasan Konservasi yang Terehabilitasi dan terkelola			20,100	20,100	20,100	20,100	20,100	20,100			
12	Menurunkan kasus illegal fishing			45	35	25	15	5	8			

Berdasarkan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata cara Evaluasi RRPJPD dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD dan RKPD sebagaimana telah dimuat dalam Peraturan Bupati Tanah Bumbu No.31 Tahun 2017 Tentang Tugas Pokok, Fungsi, Uraian tugas dan Tata Kerja Unsur-unsur Organisasi Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu, Sejak Tahun 2017 Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu memiliki dua Bidang yaitu Bidang Perikanan Tangkap dan Bidang Perikanan Budidaya sehingga Indikator Kinerja Utama (IKU) yang menjadi tanggung Jawab melekat sesuai dengan Tupoksi pada Dinas Perikanan berdasarkan aturan Tersebut yaitu :

1. Produksi Perikanan yang terdiri :

a. Produksi Perikanan Tangkap

Berdasarkan indikator kinerja Utama *Produksi Perikanan Tangkap*, Target Produksi yang direncanakan Sebesar 48,143.41ton/tahun pada Tahun 2017 dari Target tersebut dapat terealisasi produksi perikanan tangkap sebesar 42.537,76 Ton atau kurang sebanyak 5.605,66 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian kinerja hanya 88,36%, dengan hasil evaluasi kinerja masih bisa dikategorikan *Sangat Baik / Sangat Berhasil*

b. Produksi Perikanan Budidaya.

Berdasarkan Indikator kinerja Utama Produksi Perikanan Budidaya, peningkatan produksi perikanan budidaya dengan target yang telah ditetapkan di RENSTRA 2016-2020 pada tahun 2017 yaitu 5.482 Ton dan terealisasi produksi perikanan budidaya sebanyak 4.207,85 Ton atau kurang sebanyak 1.274,15 Ton dari target yang telah ditetapkan, ini terlihat bahwa target produksi tidak terpenuhi dengan capaian kinerja hanya 76,76% dan hasil evaluasi kinerja masih bisa dikategorikan *Baik / Berhasil*

2. Produksi Perikanan Kelompok Nelayan

Dari Total Produksi Perikanan tentunya ada Kontribusi Produksi Perikanan yang disumbangkan oleh Kelompok-kelompok Nelayan Binaan yang telah memperoleh bantuan dan Binaan. Melalui indikator Kinerja Utama Produksi Perikanan Kelompok Nelayan dapat terlihat prosentase sumbangsih kelompok-kelompok tersebut dimana Produksi Perikanan Kelompok Nelayan pada Tahun 2017 ditargetkan sebesar 25,8 % dari total Produksi Perikanan dan Terealisasi

sebesar 17,96 %, dari angka tersebut memang terlihat belum mencapai Target yang diinginkan hal tersebut tentunya disebabkan oleh banyak factor. Namun angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 3,86 % dari realisasi Tahun sebelumnya yaitu sebesar 14,1 %

3. Cakupan Bina Kelompok Nelayan

Cakupan Bina Kelompok Nelayan digunakan untuk melihat berapa persen jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda terhadap jumlah Kelompok nelayan setiap tahunnya. Indikator ini dihitung dengan menghitung jumlah kelompok nelayan yang mendapatkan bantuan pemda dibagi dengan jumlah kelompok nelayan setiap tahun dikali 100%. Target Cakupan Bina Kelompok Nelayan Tahun 2017 10,99 dengan realisasi 7,14 meskipun tidak mencapai target namun realisasi tahun 2017 mengalami kenaikan dari tahun 2016 yaitu sebesar 79,5%.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan

Isu-isu strategis yang sesuai dengan Tugas dan Fungsi Dinas Perikanan yang dihadapi dalam rangka Pembangunan Kabupaten Tanah Bumbu antara lain adalah:

1. Belum dikelolanya Potensi Kemaritiman Secara Maksimal
2. Belum tersedianya tempat pelelangan ikan
3. Pemanfaatan teknologi penangkapan ikan yang belum optimal karena masih menggunakan teknologi konvensional.
4. Pengembangan perikanan budidaya masih sangat kecil.
5. Kualitas Produksi Hasil Pengolahan hasil Sub Sektor Perikanan masih rendah
6. Degradasi sumberdaya ikan baik perairan laut maupun perairan umum
7. Rendahnya Produktivitas nelayan
8. Keterbatasan Kemampuan anggaran pemerintah daerah

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Untuk menjaga bahwa Perencanaan pembangunan yang direncanakan agar tetap dalam koridor yang ada dan sesuai dengan yang diinginkan, tentunya Dinas Perikanan harus melakukan Review Terhadap Program Kegiatan yang telah direncanakan dengan harapan untuk mengetahui bahwa program dan kegiatan tersebut masih layak atau tidak untuk dilaksanakan dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kondisi aktual yang ada.

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2018 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat dilihat pada Tabel berikut ini.

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Dinas Perikanan

No	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana	
-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9	-10	-11	-12
	BELANJA				Rp 15,852,109,888	BELANJA				Rp 13,252,109,888	
I	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Diskan		1 Tahun	Rp 2,111,604,888	BELANJA TIDAK LANGSUNG	Diskan		1 Tahun	Rp 2,111,604,888	
	Gaji Pokok dan Tunjangan	Diskan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur	13 Bulan	Rp 1,049,124,888	Gaji Pokok dan Tunjangan	Diskan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur	13 Bulan	Rp 1,049,124,888	
	Tunjangan Beban Kerja		Tersedianya Tunjangan Beban Kerja Aparatur	12 bulan	Rp 1,062,480,000	Tunjangan Beban Kerja		Tersedianya Tunjangan Beban Kerja Aparatur	12 bulan	Rp 1,062,480,000	
II	BELANJA LANGSUNG				Rp 13,740,505,000	BELANJA LANGSUNG				Rp 11,140,505,000	
A	KEGIATAN RUTIN	Diskan			Rp 2,320,505,000	KEGIATAN RUTIN	Diskan			Rp 2,320,505,000	
1	Program Administrasi Perkantoran	Diskan	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,210,505,000	Program Administrasi Perkantoran	Diskan	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,210,505,000	
a	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskan	Terbayarnya Rekening Kantor	12 bulan	Rp 129,250,000	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Diskan	Terbayarnya Rekening Kantor	12 bulan	Rp 129,250,000	

b	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Diskan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	42 Unit	Rp	52,200,000	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Diskan	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	42 Unit	Rp	52,200,000
c	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp	212,210,000	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Diskan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp	212,210,000
d	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Diskan	tersedianya alat dan bahan kebersihan Kantor	12 Bulan	Rp	9,000,000	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Diskan	tersedianya alat dan bahan kebersihan Kantor	12 Bulan	Rp	9,000,000
e	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Diskan	terpeliharanya peralatan kerja	50 unit	Rp	14,000,000	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	Diskan	terpeliharanya peralatan kerja	50 unit	Rp	14,000,000
f	Penyediaan alat tulis kantor	Diskan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Rp	35,000,000	Penyediaan alat tulis kantor	Diskan	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Rp	35,000,000
g	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Diskan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp	10,000,000	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Diskan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp	10,000,000
h	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskan	Tersedianya alat listrik kantor	12 Bulan	Rp	5,000,000	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Diskan	Tersedianya alat listrik kantor	12 Bulan	Rp	5,000,000
i	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Unit	Rp	72,000,000	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Diskan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Unit	Rp	72,000,000
j	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	Rp	4,320,000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Diskan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	Rp	4,320,000
k	Penyediaan Makan dan Minum	Diskan	Tersedianya makan dan Minum	900 OK	Rp	16,200,000	Penyediaan Makan dan Minum	Diskan	Tersedianya makan dan Minum	900 OK	Rp	16,200,000
l	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diskan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20 ok	Rp	350,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Diskan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20 ok	Rp	350,000,000

m	Penyedia jasa tenaga non PNS	Diskan	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS	12 bulan	Rp	1,256,325,000	Penyedia jasa tenaga non PNS	Diskan	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS	12 bulan	Rp	1,256,325,000
n	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diskan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64 ok	Rp	25,000,000	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Diskan	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64 ok	Rp	25,000,000
o	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp	20,000,000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor		Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp	20,000,000
2	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Diskan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp	75,000,000	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Diskan	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasarana Aparatur	100%	Rp	75,000,000
b	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Diskan	Terpelihara Bangunan Gedung Kantor	4 Unit	Rp	75,000,000	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Diskan	Terpelihara Bangunan Gedung Kantor	4 Unit	Rp	75,000,000
3	Program peningkatan disiplin aparatur	Diskan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai	100%	Rp	35,000,000	Program peningkatan disiplin aparatur	Diskan	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai	100%	Rp	35,000,000
a	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Diskan	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	90 Stell	Rp	35,000,000	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Diskan	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	90 Stell	Rp	35,000,000
B	KEGIATAN TEKNIS				Rp	11,420,000,000	KEGIATAN TEKNIS				Rp	8,820,000,000
4	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kab.Tanah Bumbu	Produksi Perikan Budidaya	5.091,50 Ton	Rp	10,420,000,000	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Kab.Tanah Bumbu	Produksi Perikan Budidaya	5.091,50 Ton	Rp	7,820,000,000
		Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan	65 Kelompok				Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan	65 Kelompok		

a	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBUG	Jumlah Benih Udang Galah	350,000 Ekor	Rp 500,000,000	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	BBUG	Jumlah Benih Udang Galah	350,000 Ekor	Rp 500,000,000
b	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Pokdakan yang terbina	40 kelompok	Rp 2,470,000,000	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Pokdakan yang terbina	40 kelompok	Rp 2,470,000,000
c	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Budidaya yang Mendapat Bantuan	25 Kelompok	Rp 7,450,000,000	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Budidaya yang Mendapat Bantuan	25 Kelompok	Rp 4,850,000,000
		Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	5 Jenis			Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	5 Jenis	
	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Kab.Tanah Bumbu	Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar	1 Dokumen	100,000,000	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Kab.Tanah Bumbu	Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar	1 Dokumen	100,000,000
	Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,	Kab.Tanah Bumbu	<i>Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar</i>	1 Dokumen	100,000,000	Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,	Kab.Tanah Bumbu	<i>Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar</i>	1 Dokumen	100,000,000
	Fiesebelity Study Budidaya Ikan di Eks Galian Tambang Dengan Keramba Jaaring Apung	Kab.Tanah Bumbu	<i>Rekomendasi Hasil FS</i>			Fiesebelity Study Budidaya Ikan di Eks Galian Tambang Dengan Keramba Jaaring Apung	Kab.Tanah Bumbu	<i>Rekomendasi Hasil FS</i>		
6	program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kab.Tanah Bumbu	Produksi Perikanan Tangkap	21.555,84 Ton	Rp 900,000,000	program Pengembangan Perikanan Tangkap	Kab.Tanah Bumbu	Produksi Perikanan Tangkap	21.555,84 Ton	Rp 900,000,000
		Kab.Tanah Bumbu	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	42.41%			Kab.Tanah Bumbu	Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	42.41%	
		Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan	48 Kelompok			Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan	48 Kelompok	

a	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Nelayan yang Mendapat Bantuan	11.302.15 Ton	Rp 900,000,000	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Nelayan yang Mendapat Bantuan	11.302.15 Ton	Rp 900,000,000	
		Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan	40 kelompok			Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan	40 kelompok		
b	Fasilitasi Perijinan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah lin Yang diterbitkan	300 Dokumen	Rp 150,000,000	Fasilitasi Perijinan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	Kab.Tanah Bumbu	Jumlah lin Yang diterbitkan	300 Dokumen	Rp 150,000,000	
		Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun	1 uit			Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun	1 uit		
		Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				Kab.Tanah Bumbu	Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)			

2.5. Penelaahan Usulan Kegiatan Masyarakat

Dalam menyusun Program dan Kegiatan, Dinas Perikanan senantiasa membuka diri terhadap saran dan masukan dari para stekholder terkait pembangunan sektor perikanan, hal ini dipandang sangat penting dilakukan untuk memperoleh program dan kegiatan yang berkualitas serta tepat sasaran.

Dalam merealisasikan hal tersebut tentunya Dinas Perikanan selalu berpegangan pada peraturan yang berlaku, dalam aturan yang ada terdapat beberapa mekanisme penyerapan Usulan dan masukan Program/kegiatan diantaranya yaitu usulan langsung oleh masyarakat dengan cara berjenjang melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (musrenbang) mulai tingkat terendah sampai tertinggi, Melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mekanisme penyerapan aspirasi langsung oleh anggota DPRD (Reses DPRD) maupun usulan-usulan Button Up lainnya seperti permohonan dan Proposal langsung oleh Kelompok Binaan.

Selain itu Dinas Perikan juga secara aktif melakukan kordinasi kepada instansi lain terkait pembangunan sektor perikanan untuk memperoleh informasi aktual yang relevan terhadap pembangunan Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu.

Hal ini dapat dilihat pada Tabel T-C.32 untuk Usulan Program dan kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun 2019 berikut ini.

Tabel. 2.5
Usulan Program dan Kegiatan dari Pemangku Kepentingan Tahun Anggaran 2019
Kabupaten Tanah Bumbu

Dinas : Perikanan

No (1)	Lokasi (3)	Indikator Kinerja (4)	Besaran/Volume (5)	Catatan (6)
	BELANJA			
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 Tahun	
	Gaji Pokok dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur	13 Bulan	
	Tunjangan Beban Kerja	Tersedianya Tunjangan Beban Kerja Aparatur	12 bulan	
	BELANJA LANGSUNG			
	KEGIATAN RUTIN			
1	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Kantor	12 bulan	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	42 Unit	
3	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	
4	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat dan bahan kebersihan Kantor	12 Bulan	
5	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja	50 unit	
6	Penyediaan alat tulis kantor	Tesedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	
7	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	
8	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor	12 Bulan	
9	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Unit	
10	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	
11	Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makan dan Minum	900 OK	
12	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20 ok	
13	Penyedia jasa tenaga non PNS	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS	12 bulan	
14	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64 ok	
15	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	Sesuai hasil analisis kebutuhan ranwal RKPD

1	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor		Terpelihara Bangunan Gedung Kantor	4 Unit
III	Program peningkatan disiplin aparatur		Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai	100%
1	Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu		Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	90 Stell
	KEGIATAN TEKNIS			
IV	Program Pengembangan Budidaya Perikanan		Produksi Perikan Budidaya	5.091,50 Ton
			Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan	65 Kelompok
1	Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul		Jumlah Benih Udang Galah	350,000 Ekor
2	Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan		Jumlah Pokdakan yang terbina	40 kelompok
3	Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya		Jumlah Kelompok Budidaya yang Mendapat Bantuan	25 Kelompok
			Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	5 Jenis
V	Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar		Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar	1 Dokumen
1	Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar,		<i>Jumlah Laporan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar</i>	1 Dokumen
2	Fisebelity Study Budidaya Ikan di Eks Galian Tambang Dengan Keramba Jaaring Apung		<i>Rekomendasi Hasil FS</i>	
VI	program Pengembangan Perikanan Tangkap		Produksi Perikanan Tangkap	21.555,84 Ton
			Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	44.72%
			Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan	48 Kelompok
1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Nelayan yang Mendapat Bantuan	11.302.15 Ton
			Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan	40 kelompok
2	Fasilitasi Perijinan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan		Jumlah lin Yang diterbitkan	300 Dokumen
			Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun	1 uit
			Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	

BAB III TUJUAN DAN SASARAN

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Keterkaitan Kebijakan Prioritas Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta Program dan Kegiatan pada SKPD Dinas Perikanan dapat dijelaskan sebagai berikut:

No	Kebijakan				Ket
	Program dan Kegiatan SKPD	Kabupaten	Provinsi	Nasional	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	1. Program Pengembangan Budidaya Perikanan <ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan Bibit Ikan Unggul - Pembinaan dan Pengembangan Perikanan - Pengembangan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya 2. Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar <ul style="list-style-type: none"> - Kegiatan Pemetaan Potensi Kawasan Budidaya Perikanan Air Tawar, - Fiesebelity Study Budidaya Ikan di Eks Galian Tambang Dengan Keramba Jaaring Apung 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan pusat informasi maritim berbasis IT; - Pengembangan Budidaya Ikan dalam skala besar; 	<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan budidaya perikanan 	Peningkatan Produksi pangan	
2	1. Program Pengembangan Perikanan tangkap <ul style="list-style-type: none"> - Pemeliharaan rutin/berkala tempat pelelangan ikan - Pendampingan kelompok nelayan tangkap - Pengembangan sarana dan prasarana perikanan tangkap - Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan dan Fasilitasi Perizinan 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sarana penangkapan ikan bagi para nelayan; - Penyediaan Sarana untuk menampung dan memasarkan hasil tangkap nelayan. 	<ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan Kemandirian Pangan 		

3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

1. Tujuan

- a. Membantu Meningkatkan Produksi Perikanan
- b. Menyediakan Produk olahan yang bernilai tambah dan berdaya saing tinggi
- c. Menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan
- d. Menilai pencapaian sasaran, tujuan dan kinerja pembangunan daerah berdasarkan indikator dan sasaran kinerja yang ditetapkan
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia

2. Sasaran Renja

- a. Meningkatnya Produksi Perikanan
- b. Meningkatkan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
- c. Tersedianya Sarana dan Prasarana Perikanan
- d. Meningkatkan hasil produksi dan pemanfaatan sumberdaya perikanan
- e. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia aparatur perencana maupun masyarakat.
- f. Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang dalam pengembangan sumberdaya perikanan
- g. Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat
- h. Memperkokoh identitas dan jati diri dalam mengembangkan sektor perikanan

3.3. Program dan Kegiatan

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan, Pada Tahun 2019 Dinas Perikanan merencanakan untuk dapat melaksanakan 5 (lima) Program dan 22 (dua puluh dua) Kegiatan Prioritas dengan sebaran Lokasi wilayah Pesisir dan wilayah-wilayah yang memiliki potensi perikanan yang layak untuk dikembangkan. Dari rencana Program dan Kegiatan tahun 2019 tersebut dibutuhkan dana sebesar Rp. 13.152.109.888,- Dengan Komposisi belanja Rutin Sebesar Rp. 2.320.505.000,- dan untuk teknis sebesar Rp. 8.720.000.000,-

Program dan Kegiatan Prioritas tersebut diatas tentunya harus dapat terukur melalui indikator-indikator capaian kinerja yang sesuai dengan Program dan Kegiatan tersebut guna menunjukkan seberapa berhasil Program dan kegiatan prioritas tersebut dalam mencapai target yang ditentukan, Untuk lebih jelasnya Program dan Kegiatan serta Indikator capaian Kinerja dan Pendanaan Dinas Perikanan di Tahun 2019 serta Perkiraan Maju Rencana dinas Perikanan Tahun 2020 tergambar dalam table berikut :

Tabel 3.3
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2019
dan Prakiraan Maju Tahun 2020
Kabupaten Tanah Bumbu

Nama SKPD : Dinas Perikanan

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan/Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kineja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2019					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2020	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana	Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra SKPD		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
	BELANJA				Rp 13,252,109,888					Rp 9,350,742,376
	BELANJA TIDAK LANGSUNG			1 Tahun	Rp 2,111,604,888					Rp 2,216,517,376
	Gaji Pokok dan Tunjangan	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur		13 Bulan	Rp 1,049,124,888					Rp 1,154,037,376
	Tunjangan Beban Kerja	Tersedianya Tunjangan Beban Kerja Aparatur		12 bulan	Rp 1,062,480,000					Rp 1,062,480,000
5	2	BELANJA LANGSUNG			Rp 11,140,505,000					Rp 7,134,225,000
	KEGIATAN RUTIN				Rp 2,320,505,000					Rp 2,340,505,000
	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran		100%	Rp 2,210,505,000			100%	100%	Rp 2,230,505,000
	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Terbayarnya Rekening Kantor		12 bulan	Rp 129,250,000			12 Bulan	12 Bulan	Rp 129,250,000
	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara		42 Unit	Rp 52,200,000			44 Unit	44 Unit	Rp 52,200,000
	Penyediaan jasa administrasi keuangan	Tersedianya jasa administrasi Keuangan		12 Bulan	Rp 212,210,000			12 Bulan	12 Bulan	Rp 212,210,000
	Penyediaan jasa kebersihan kantor	tersedianya alat dan bahan kebersihan Kantor		12 Bulan	Rp 9,000,000			12 bulan	13 Bulan	Rp 9,000,000
	Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja	terpeliharanya peralatan kerja		50 unit	Rp 14,000,000			50 unit	50 unit	Rp 14,000,000
	Penyediaan alat tulis kantor	Tesedianya Alat Tulis Kantor		12 Bulan	Rp 35,000,000			12 bulan	12 bulan	Rp 35,000,000
	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan		12 Bulan	Rp 10,000,000			12 bulan	12 bulan	Rp 10,000,000
	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Tersedianya alat listrik kantor		12 Bulan	Rp 5,000,000			12 bulan	12 bulan	Rp 5,000,000
	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor		14 Unit	Rp 72,000,000			101 Unit	17 Unit	Rp 72,000,000

										Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Tersedianya Bahan Bacaan		12 Bulan	Rp	4,320,000		1500 ok		1500 ok	Rp	4,320,000
										Penyediaan Makan dan Minum	Tersedianya makan dan Minum		900 OK	Rp	16,200,000		12 Bulan		12 Bulan	Rp	16,200,000
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah		20 ok	Rp	350,000,000		140 ok		140 ok	Rp	350,000,000
										Penyedia jasa tenaga non PNS	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS		12 bulan	Rp	1,256,325,000		12 Bulan		780 ob	Rp	1,256,325,000
										Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah		64 ok	Rp	25,000,000		435 ok		435 ok	Rp	45,000,000
										Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor		12 Bulan	Rp	20,000,000		12 Bulan		12 Bulan	Rp	20,000,000
										Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaran Aparatur		100%	Rp	75,000,000		100%		100%	Rp	75,000,000
										Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terpelihara Bangunan Gedung Kantor		4 Unit	Rp	75,000,000		15 unit		4 unit	Rp	75,000,000
										Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai		100%	Rp	35,000,000		100%		100%	Rp	35,000,000
										Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu		90 Stell	Rp	35,000,000		445 Stell		90 Stell	Rp	35,000,000
										KEGIATAN TEKNIS				Rp	8,820,000,000					Rp	4,793,720,000
										Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikan Budidaya		5.091,50 Ton	Rp	7,820,000,000		5.600,65 Ton		5.600,65 Ton	Rp	3,453,720,000
									Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan			65 Kelompok				366 Kelompok		60 Kelompok			
										Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul	Jumlah Benih Udang Galah		350,000 Ekor	Rp	500,000,000		350,000 Ekor			Rp	402,720,000
										Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan	Jumlah Pokdakan yang terbina		40 kelompok	Rp	2,470,000,000		190 Kelompok		40 kelompok	Rp	1,906,000,000
										Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya	Jumlah Kelompok Budidaya yang Mendapat Bantuan		25 Kelompok	Rp	4,850,000,000		176 Kelompok		24 Kelompok	Rp	1,145,000,000
									Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya			5 Jenis				27 jenis		4 Jenis			
										Program Pengembangan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Air Tawar	Rekomendasi Hasil Pemetaan Kawasan Budidaya Laut, Air Payau dan Ikan Air Tawar		1 Dokumen	100,000,000		4 Dokumen		2 Dokumen	300,000,000		

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Strategi dan Kebijakan

1. Strategi

a. *Penerapan Teknologi Anjuran yang direkomendasikan Kementerian Kelautan dan Perikanan*

Teknologi sangat berperan penting dalam pengelolaan sumberdaya Perikanan, dengan menggunakan teknologi yang konvensional tentunya sangat jauh hasil yang diperoleh jika dibandingkan dengan penggunaan teknologi yang lebih muktakhir begitu juga dengan pengelolaan sumberdaya Perikanan.

Penggunaan teknologi termuktakhir yang dianjurkan oleh Kementerian Kelautan dan Perikanan tentunya akan memberi hasil yang jauh lebih positif dan telah teruji dalam pengelolaan sumberdaya hulu-hilir bidang perikanan

b. *Normalisasi saluran dan Revitalisasi Tambak serta pelaksanaan program PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak Partisipasi masyarakat)*

Potensi lahan tambak 13.098 ha yang aktif 3.457 dan 6.092, 92 ha untuk Budidaya air Tawar yang aktif 34,44 Ha. Dari data tersebut terlihat bahwa masih banyak lahan yang belum termanfaatkan secara optimal hal ini disebabkan adanya lahan tambak marginal dan Kawasan budidaya air payau sebagian juga merupakan kawasan sumber daya alam (KSDA), untuk perlunya normalisasi saluran dan revitalisasi tambak serta pelaksanaan program PITAP (Pengelolaan Irigasi Tambak partisipasi Masyarakat) baik disekitar tambak produksi maupun di kawasan lahan tambak marginal

c. *Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan Kelompok Nelayan*

Kabupaten Tanah Bumbu memiliki data nelayan sebanyak 1,587 Rumah Tangga Perikanan (RTP) yang tergabung dalam 209 Kelompok Usaha Bersama (KUB) nelayan serta telah berdiri 3 buah koperasi nelayan yang tersebar di seluruh Kecamatan yang ada di wilayah Kabupaten Tanah Bumbu khususnya wilayah kecamatan yang berhadapan dengan pesisir laut serta perairan umum, namun terkait dengan sumberdaya manusia merupakan salah satu kendala dalam pertumbuhan perkembangan perikanan tangkap terutama dalam hal pengelolaan administrasi kelompok sangat kurang sehingga dinamika kelompok tidak berjalan sebagaimana

yang diharapkan. Setiap perkembangan teknologi penangkapan ikan tentunya tidak bisa diikuti atau diterima langsung oleh masyarakat nelayan, untuk itu diperlukan bimbingan dari Dinas Kelautan dan Perikanan atau Satuan Kerja Perangkat daerah (SKPD) lainnya dalam hal ini melakukan pembinaan dan pelatihan kelompok nelayan .

d. Meningkatkan Pembinaan dan Pelatihan POKDAKAN

Salah satu upaya pengembangan budidaya perikanan untuk pelaku utama/usaha dengan tujuan untuk merangsang wirausaha baru dan memperluas kawasan budidaya air tawar yang belum dimanfaatkan secara optimal yang salah satunya adalah upaya pengembangan budidaya dalam rangka peningkatan perekonomian pokdakan, untuk menunjang hal tersebut perlu pengembangan sumberdaya manusia pada sektor perikanan dan kelautan melalui peningkatan pembinaan dan pelatihan POKDAKAN yang di fasilitasi oleh dinas.

e. Memprioritaskan penyediaan anggaran untuk kegiatan rutin dan mendukung Tupoksi Dinas

2. Kebijakan

Kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan Kabupaten Tanah Bumbu didasarkan pada pendekatan pembangunan yang diarahkan agar mampu memainkan peranan utama dalam perbaikan perekonomian daerah, dalam arti dapat memposisikan sebagai penggerak pembangunan ekonomi daerah dan membudayakan masyarakat pembudidaya ikan/nelayan agar mampu mandiri dalam melaksanakan usahanya yang meliputi :

- a. Pengembangan dan peningkatan sarana prasarana industri perikanan
- b. Pengembangan dan optimalisasi Potensi-Potensi budidaya air tawar dan perikanan tangkap
- c. Peningkatan Pembinaan dan Pelatihan Kelompok
- d. Melaksanakan pelayanan yang optimal serta melakukan penganggaran yang efektif dan efisien.
- e. Menerapkan Absensi Teknologi sidik jari dan absensi manual.

4.2 Rencana Kerja dan Pendanaan

Berdasarkan Kebijakan Prioritas Kabupaten Tanah Bumbu yang telah diselaraskan dengan Kebijakan Nasional dan Provinsi yang sebagaimana telah terakomodir dalam Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Perikanan, Pada

Tahun 2019 Dinas Perikanan Melaksanakan Program dan Kegiatan Prioritas yang telah diamanatkan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-20121 yaitu sebagai berikut:

1. Program Pengembangan Perikanan Tangkap
 - a. Kegiatan Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap
 - b. Kegiatan Fasilitasi Perijinan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan
2. Program Pengembangan Perikanan Budidaya
 - a. Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan
 - b. Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya
 - c. Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul
3. Program Administrasi Perkantoran
 - a. Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya air dan Listrik
 - b. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas/Operasional
 - c. Kegiatan Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
 - d. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
 - e. Kegiatan Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
 - f. Kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor
 - g. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggadaan
 - h. Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - i. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
 - j. Kegiatan Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - k. Kegiatan Penyediaan Makan dan Minum
 - l. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah
 - m. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Non PNS
 - n. Kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah
 - o. Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - p. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
 - q. Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor
4. Program Disiplin Aparatur
 - a. Kegiatan Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu

Tabel 4.2
Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2019

Dinas : Perikanan

No	Rencana Kerja			Pendanaan	
	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja (Outcome/Output)	Target Kinerja (Outcome/Output)	APBD	Ket
1	2	3	4	5	6
	BELANJA			Rp 13,152,109,888	
	BELANJA TIDAK LANGSUNG		1 Tahun	Rp 2,111,604,888	
1	<i>Gaji Pokok dan Tunjangan</i>	Tersedianya Gaji dan Tunjangan Aparatur	13 Bulan	Rp 1,049,124,888	
2	<i>Tunjangan Beban Kerja</i>	Tersedianya Tunjangan Beban Kerja Aparatur	12 bulan	Rp 1,062,480,000	
	BELANJA LANGSUNG			Rp 11,040,505,000	
	KEGIATAN RUTIN			Rp 2,320,505,000	
A	Program Administrasi Perkantoran	Tingkat Ketersediaan Layanan Administrasi Perkantoran	100%	Rp 2,210,505,000	
1	<i>Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik</i>	Terbayarnya Rekening Kantor	12 bulan	Rp 129,250,000	
2	<i>Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional</i>	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang terpelihara	42 Unit	Rp 52,200,000	
3	<i>Penyediaan jasa administrasi keuangan</i>	Tersedianya jasa administrasi Keuangan	12 Bulan	Rp 212,210,000	
4	<i>Penyediaan jasa kebersihan kantor</i>	tersedianya alat dan bahan kebersihan Kantor	12 Bulan	Rp 9,000,000	
5	<i>Penyediaan jasa perbaikan peralatan kerja</i>	terpeliharanya peralatan kerja	50 unit	Rp 14,000,000	
6	<i>Penyediaan alat tulis kantor</i>	Tersedianya Alat Tulis Kantor	12 Bulan	Rp 35,000,000	
7	<i>Penyediaan barang cetakan dan penggandaan</i>	Tersedianya Barang cetakan dan Penggandaan	12 Bulan	Rp 10,000,000	
8	<i>Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor</i>	Tersedianya alat listrik kantor	12 Bulan	Rp 5,000,000	
9	<i>Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor</i>	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Kantor	14 Unit	Rp 72,000,000	
10	<i>Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan</i>	Tersedianya Bahan Bacaan	12 Bulan	Rp 4,320,000	

11	<i>Penyediaan Makan dan Minum</i>	Tersedianya makan dan Minum	900 OK	Rp 16,200,000	
12	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi luar daerah	20 ok	Rp 350,000,000	
13	<i>Penyedia jasa tenaga non PNS</i>	Tersedianya Jasa Tenaga Non PNS	12 bulan	Rp 1,256,325,000	
14	<i>Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah</i>	Jumlah rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam daerah	64 ok	Rp 25,000,000	
15	<i>Penyediaan Bahan Logistik Kantor</i>	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	12 Bulan	Rp 20,000,000	
B	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	Tingkat Kelengkapan Sarana dan Prasaran Aparatur	100%	Rp 75,000,000	
1	<i>Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor</i>	Terpelihara Bangunan Gedung Kantor	4 Unit	Rp 75,000,000	
C	Program peningkatan disiplin aparatur	Tingkat Kedisiplinan Aparatur dalam kehadiran Penggunaan Atribut Pegawai	100%	Rp 35,000,000	
1	<i>Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu</i>	Tersedianya Pakaian Khusus Hari-hari Tertentu	90 Stell	Rp 35,000,000	
	KEGIATAN TEKNIS			Rp 8,720,000,000	
D	Program Pengembangan Budidaya Perikanan	Produksi Perikan Budidaya	5.091,50 Ton	Rp 7,820,000,000	
		Jumlah Kelompok Budidaya yang mendapat pembinaan dan Bantuan	65 Kelompok		
1	<i>Kegiatan Pengembangan Bibit Ikan Unggul</i>	Jumlah Benih Udang Galah	350,000 Ekor	Rp 500,000,000	
2	<i>Kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Perikanan</i>	Jumlah Pokdakan yang terbina	40 kelompok	Rp 2,470,000,000	
3	<i>Kegiatan Pengembangan Sarana dan Prasarana Budidaya</i>	Jumlah Kelompok Budidaya yang Mendapat Bantuan	25 Kelompok	Rp 4,850,000,000	
		Jumlah Sarana dan Prasarana Budidaya	5 Jenis		
E	program Pengembangan Perikanan Tangkap	Produksi Perikanan Tangkap	21.555,84 Ton	Rp 900,000,000	
		Produksi Perikanan Kelompok Nelayan	44.72%		

		Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan dan Bantuan	48 Kelompok		
	1	Pendampingan Pada Kelompok Nelayan Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Ikan Kontribusi Hasil Nelayan yang Mendapat Bantuan	11.302.15 Ton	Rp 900,000,000
			Jumlah Kelompok Nelayan yang mendapat pendampingan	40 kelompok	
	2	Fasilitasi Perijinan dan Pengembangan Tempat Pelelangan Ikan	Jumlah Iin Yang diterbitkan	300 Dokumen	Rp 150,000,000
			Jumlah Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang dibangun	1 unit	
			Jumlah Sarana Prasarana Penunjang Tempat Pelelangan Ikan (TPI)		

BAB V PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Perikanan menjadi sangat penting artinya dalam mengaplikasikan berbagai persoalan-persoalan terkait dengan Perencanaan Sektor Perikanan serta sebagai wujud nyata dari tanggung jawab pemerintah dalam mengadopsi berbagai kebutuhan masyarakat yang mengedepankan perencanaan pembangunan yang berbasis pada masyarakat, *Community Base Development* (CBD) dengan keterlibatan lebih banyak para pelaku-pelaku (*stakeholders*) dalam menciptakan *Good Gavernance* sesuai dengan tuntutan paradigma baru, yang pada gilirannya akan mampu menciptakan kebijaksanaan yang dampaknya merembes kebawah (*trickle down effect*) sehingga keberpihakan pada masyarakat kecil benar-benar dikedepankan.

Output Rencana Kerja Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu adalah Program Tahunan Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu yang sesuai dengan Tupoksi dan sasaran Program Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu serta Visi, Misi Pembangunan nasional dan pemerintah daerah kabupaten Tanah Bumbu.

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Perikanan Kabupaten Tanah Bumbu selain menjadi pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019 berfungsi pula sebagai sarana peningkatan kinerja Dinas Perikanan. Sebagai bahan pelaksanaan kegiatan selama Tahun 2019, RENJA juga dapat digunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan yang dilaksanakan dalam satu tahun bagi seluruh jajaran Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu. RENJA juga memberikan umpan balik yang sangat diperlukan dalam pengambilan keputusan dan penyusunan rencana di masa mendatang oleh para pimpinan manajemen dan seluruh staf Dinas Perikanan kabupaten Tanah Bumbu sehingga akan diperoleh peningkatan kinerja ke arah yang lebih baik dimasa datang.

Demikian Rencana Kerja ini disusun dengan harapan dapat dianalisis dan dipertimbangkan penguangannya dalam R-APBD Tahun Anggaran 2019 mendatang.

Batulicin, 2018

Kepala Dinas,

Fauraji Akbar, S.P

Pembina Tk. I

NIP. 19620217 198803 1 012